

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjelma menjadi salah satu kekuatan penggerak utama dalam peta politik global kontemporer. Kedua negara berupaya memperkuat posisi globalnya melalui kompetisi di bidang ekonomi, teknologi, militer, serta perluasan pengaruh geopolitik di berbagai kawasan, khususnya di Indo-Pasifik. Situasi ini menjadikan hubungan kedua negara semakin kompetitif dan berdampak signifikan terhadap stabilitas politik serta keamanan internasional (Yanto Rosmawandi, 2022).

Persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Laut Tiongkok Selatan telah melahirkan peta keamanan yang jauh lebih rumit dan berlapis bagi keberlangsungan stabilitas Asia Tenggara. Tiongkok secara konsisten memperkuat klaim teritorialnya melalui pembangunan infrastruktur militer di wilayah sengketa, sementara Amerika Serikat bersama sekutunya seperti Australia intervensi untuk memastikan kebebasan navigasi internasional. Kehadiran kekuatan militer global ini tidak hanya meningkatkan risiko konfrontasi bersenjata yang dapat mengganggu jalur perdagangan dunia, tetapi juga memicu negara-negara tetangga seperti Indonesia untuk memperkuat pertahanan di wilayah strategis seperti Natuna guna menjaga kedaulatan mereka (Tambunan et al., 2025).

Bila dilihat dari kacamata geografi, Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang luar biasa strategis, yakni berada tepat di persilangan dua Samudra besar, Hindia dan Pasifik. Keistimewaan letak ini bukan hanya menjadikan Indonesia

sebagai simpul jalur maritim dunia, melainkan juga menempatkannya sebagai aktor kunci dalam sistem geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan tekanan eksternal yang signifikan terhadap Indonesia, baik dalam aspek keamanan regional maupun stabilitas domestik.

Isu keamanan maritim menjadi semakin sentral bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa terpeliharanya stabilitas keamanan merupakan inti dari kepentingan nasional yang wajib dijaga dan dipertahankan. Mengingat sekitar 75% wilayah Indonesia berupa lautan, kewajiban untuk terus memantau dinamika keamanan di perairan nasional menjadi kepastian dalam menentukan prioritas pertahanan dan arah kebijakan luar negeri yang tepat (Pertahanan, 2015).

Dalam konteks kepentingan nasional, perhatian utama Indonesia di ranah keamanan maritim tertuju pada upaya menjaga keutuhan wilayah dan mempertahankan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Melalui wadah *ASEAN Maritime Forum* (AMF), Indonesia mengelola kompleksitas sengketa perbatasan laut dengan lebih dari sepuluh negara tetangga secara damai melalui dialog dan tukar pikiran. Inti dari prioritas keamanan ini adalah memastikan perlindungan bentang laut yang sangat luas dari berbagai ancaman lintas batas, mulai dari pembajakan, terorisme di perairan, hingga perdagangan gelap senjata dan manusia. Tak kalah pentingnya, Stabilitas di jalur-jalur strategis seperti selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dipandang sebagai prasyarat absolut agar Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan ekonomi maritimnya secara optimal demi kemakmuran nasional (Rijal, 2018).

Prinsip bebas aktif merupakan sendi utama diplomasi Indonesia yang menegaskan sikap mandiri bangsa untuk tidak mengikatkan diri pada blok kekuatan mana pun, sekaligus meneguhkan komitmen Indonesia dalam mendorong terwujudnya tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. Dalam konteks modern, implementasi prinsip ini terlihat jelas pada sikap Indonesia yang menolak klaim sepihak Tiongkok di Laut China Selatan namun tetap menghindari aliansi militer penuh dengan Amerika Serikat, sembari terus mendorong peran ASEAN sebagai jembatan dialog guna mempertahankan stabilitas keamanan dan kelancaran arus perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara (Haryanto, 2014a).

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 3 dan 4, pada dasarnya menyatakan bahwa "Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orientasi politik luar negeri Indonesia sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan nasional, dilaksanakan lewat diplomasi yang inovatif dan antisipatif bukan sekadar reaktif, serta dijiwai sikap teguh dalam prinsip namun tetap luwes dan rasional dalam pelaksanaannya." (Agatha Eka Febriani Hangin et al., 2025).

Dalam menghadapi dinamika persaingan dua kekuatan besar, prinsip bebas aktif diwujudkan melalui strategi *hedging* sebagai mekanisme adaptif yang terencana dan terukur. Hubungan ini terwujud dalam upaya Indonesia menjaga otonomi strategis dengan menyeimbangkan ketergantungan ekonomi yang besar terhadap Tiongkok terutama melalui investasi infrastruktur dan *Belt and Road Initiative* dengan kerja sama pertahanan strategis bersama Amerika Serikat, termasuk latihan militer gabungan dan kerja sama keamanan maritim. Melalui pendekatan ini, Indonesia menjaga esensi "Bebas" dengan tidak bergabung dalam aliansi militer mana pun,

sekaligus tetap hadir sebagai *middle power* yang “Aktif” mengedepankan sentralitas ASEAN dan forum multilateral seperti *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) untuk meredam rivalitas global demi kepentingan nasional (Kiki Kurniawan et al., 2026).

Dalam konteks tersebut, konsep *hedging* menjadi pendekatan yang relevan. Evelyn Goh menjelaskan *hedging* sebagai pilihan strategis negara-negara Asia Tenggara yang tidak ingin terikat pada satu kekuatan besar, melainkan meramu secara bersamaan elemen keterlibatan (*engagement*) dan pembatasan (*balancing*) untuk bertahan dalam ketidakpastian strategis yang terus berubah (Goh, 2007). Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap berinteraksi secara ekonomi dan politik dengan kedua pihak, sambil meminimalkan risiko terhadap keamanan nasionalnya. Kuik memperkaya pemahaman ini dengan menegaskan bahwa *hedging* tidak hanya soal kalkulasi material semata, melainkan juga memiliki dimensi normative yang kuat, mencakup nilai-nilai kedaulatan, keharmonisan kawasan, dan cita-cita perdamaian (Kuik, 2008).

Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota aktif G20, Indonesia secara alami menempati posisi *middle power* yang memiliki bobot signifikan dalam menjaga keseimbangan kawasan. Menurut Chapnick negara *middle power* cenderung menempuh diplomasi kooperatif dan multilateral untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam kompetisi hegemoni (Chapnick, 2000). Dalam bingkai inilah, kebijakan bebas aktif Indonesia berfungsi sebagai pilar utama untuk mempertahankan otonomi strategis. Prinsip ini menegaskan hak Indonesia dalam

mengambil posisi mandiri atas setiap isu internasional, namun tetap aktif bukan pasif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.

Kebijakan luar negeri Indonesia dirancang untuk melindungi kepentingan nasional di Tengah pusaran rivalitas, salah satunya dengan merawat hubungan kerja sama yang seimbang dengan kedua kekuatan besar tanpa secara terang-terangan memihak salah satu pihak, sekaligus mendiversifikasi kerja sama pertahanan ke berbagai negara lain. Pada tanggal 10 Februari 2022 Indonesia membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Langkah akuisisi alutsista dari Prancis ini merupakan wujud nyata dari implementasi strategis *Hedging* untuk menghadapi dinamika konflik di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kapabilitas militer Indonesia sekaligus memutus ketergantungan pada satu blok kekuatan tertentu dalam system internasional (Basundoro, 2023).

Indonesia turut mengkonsolidasikan kemitraan ekonominya dengan bergabung sebagai anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan berpartisipasi dalam *proyek Belt and Road Initiative*, termasuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terwujud pada 2018 (Yudilla, 2019). Indonesia juga menjalin Kerjasama pertanian dengan Tiongkok dalam kerangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sejak tahun 2015. Kerangka perdagangan bebas ini terbukti mempererat ikatan bilateral antara kedua negara di berbagai sektor (Hasibuan & Sinambela, 2024).

Selanjutnya Indonesia juga bekerjasama dengan Tiongkok dalam proyek investasi nikel sejak tahun 2017. Kemitraan di sektor nikel ini menciptakan saling ketergantungan yang erat dalam rantai produksi dan distribusi mineral strategis,

sekaligus mencerminkan posisi investasi Tiongkok sebagai bagian integral dari strategi industrialisasi nasional Indonesia (Fauziyyah & Paksi, 2023).

Namun, di sisi lain, Indonesia juga menjalin kerja sama pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat melalui latihan militer seperti *Super Garuda Shield* dan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT), kondisi kerjasama ini diperluas secara multinasional sejak 2022 (Azzahra, 2025). Awal mulai Kerjasama ini pada tahun 2007 latihan ini merupakan evolusi dari latihan bersama Indonesia-AS yang dimulai tahun 2006 menjadi latihan terbesar di kawasan, mencerminkan tekad bersama dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan aman. Strategi dua jalur ini memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pertahanan tanpa mengorbankan otonomi strategisnya.

Selanjutnya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA RI) dan *US Coast Guard* (Penjaga Pantai Amerika Serikat) sejak 2015 hingga sekarang, merupakan bentuk konkret dari upaya Indonesia memanifestasikan visi Poros Maritim Dunia melalui penguatan keamanan dan respons bencana di perairan. Berbagai kepentingan nasional Indonesia diperkuat melalui kemitraan ini, antara lain alih pengetahuan, teknologi maritim, serta kerja sama pemberantasan pencurian ikan dan berbagai kejahatan di laut (Iswardhana, 2021).

Keseimbangan tersebut tidak mudah dipertahankan. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap Tiongkok dapat menimbulkan risiko bagi kemandirian diplomasi Indonesia. Ketergantungan ekonomi yang tidak terkendali dapat mempersempit ruang diplomasi, terutama ketika kepentingan ekonomi berpotensi bertentangan dengan

keamanan nasional. Oleh karena itu, *hedging* menjadi strategi penting untuk meminimalkan keterikatan ekonomi berlebih sekaligus memperkuat posisi diplomatik Indonesia terhadap Amerika Serikat.

Dalam perkembangan terbaru, Indonesia juga memainkan peran aktif dalam memperkuat *ASEAN Centrality* sebagai mekanisme kolektif menghadapi rivalitas kekuatan besar. Melalui kepemimpinan diplomatik dalam forum seperti *East Asia Summit* (EAS) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF) tahun 2023-2024, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap keamanan kawasan serta mengedepankan prinsip stabilitas dan keseimbangan kekuatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (2024) juga menegaskan pentingnya “strategi keseimbangan dinamis” dalam menghadapi rivalitas global agar ASEAN tidak terjebak dalam blok politik manapun. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif telah dioperasionalkan secara adaptif melalui strategi *hedging* di tingkat kawasan.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan luar negeri Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagian besar masih berfokus pada aspek ekonomi atau diplomasi umum tanpa menelaah secara mendalam implementasi *hedging* dalam konteks keamanan regional. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aisha Rasyidila Kusumasomantri (2018) dengan judul “Strategi *Hedging* Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan” dan Annisaa Dinda Rima & Aswin Ariyanto Azis (2024) dengan judul “Strategi *Hedging* Indonesia kepada Tiongkok dalam Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok Pada Tahun 2018-2024”. Kedua kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek diplomasi dan kerja sama ekonomi, sementara dimensi keamanan dan otonomi

strategis masih kurang dieksplorasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi *hedging* berfungsi dalam konteks keamanan dan otonomi strategis Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam strategi *hedging* Indonesia sebagai instrumen kebijakan luar negeri dalam menjaga otonomi strategis dan keamanan regional di tengah persaingan dua kekuatan besar. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan Teori *Kompleks Keamanan Regional* dan konsep *hedging* guna menjelaskan bagaimana Indonesia sebagai *middle power* mengoperasionalkan prinsip bebas aktif secara adaptif di kawasan Indo-Pasifik dengan fokus pada dimensi keamanan dan otonomi strategis, serta memperbarui analisis empiris hingga periode 2023–2024, khususnya melalui peran Indonesia dalam memperkuat sentralitas ASEAN dan stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi *hedging* dalam politik luar negeri Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok?
2. Sejauh mana strategi tersebut efektif menjaga otonomi strategis dan keamanan maritim Indonesia?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bermaksud memfokuskan penelitian ini pada:

1. Strategi *hedging* politik luar negeri Indonesia untuk menjaga otonomi strategis dan keamanan maritim di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.
2. Efektivitas politik luar negeri Indonesia dalam memperkuat otonomi strategis dan keamanan maritim.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penerapan strategi *hedging* dalam Politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas strategi *hedging* dalam menjaga otonomi strategis dan keamanan maritim Indonesia di tengah rivalitas antara dua kekuatan besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam Skripsi ini, manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman dan memperoleh wawasan mengenai strategi politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terkait isu keamanan dan

membantu memahami dalam mengintegrasikan konsep *hedging* sebagai pendekatan adaptif yang digunakan negara *middle power* di kawasan Indo-Pasifik dan berkontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional atau teori *middle power diplomacy*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia dalam merumuskan strategi diplomatik dan pertahanan yang seimbang di tengah meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan lembaga penelitian yang ingin memahami penerapan konkret strategi *hedging* dalam menjaga kepentingan nasional, otonomi strategis, dan stabilitas kawasan.